

BAGIAN KEDUA GURU YANG INSPIRATIF

TUNTUTAN JADI GURU INSPIRATIF

Terma guru inspiratif pernah dipopulerkan Rhenald Kasali, Gurubesar Fakultas Ekonomi UI. Guru inspiratif diilustrasikan sebagai pendidik yang selalu mengajak peserta didiknya untuk berpikir kreatif dan inovatif dengan cara memaksimalkan potensi yang telah dianugerahkan Tuhan (*maximum thinking*). Antitesa guru inspiratif adalah guru kurikulum. Karakteristik guru kurikulum digambarkan sebagai guru yang mengajarkan sesuatu yang standar dan biasa-biasa saja pada peserta didiknya (*habitual thinking*).

Dalam sudut pandang pendidikan, guru kurikulum dan guru inspiratif jelas sama-sama dibutuhkan bagi kesuksesan anak di masa mendatang. Guru kurikulum pada saatnya akan melahirkan manajer-manajer handal. Sedangkan guru inspiratif melahirkan para pemimpin dan pembaru yang berani mendobrak aneka kebiasaan lama. Yang menjadi keprihatinan kita adalah ternyata jumlah guru inspiratif jauh lebih sedikit dibanding guru kurikulum. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbandingan guru inspiratif dan guru kurikulum adalah 1 persen berbanding 99 persen.

Dominasi guru kurikulum di sekolah dapat diamati melalui metode pembelajaran yang dikembangkan. Guru

kurikulum biasanya terpaku dengan silabus, rencana praktik pembelajaran (RPP), dan buku teks. Hampir tidak ada ikhtiar dari guru-guru kurikulum untuk melihat keluar dan membayangkan jika pembelajaran tidak lagi menggunakan buku teks. Dalam alam pemikiran guru kurikulum, kewajiban mereka adalah mematuhi kurikulum. Karena itu, mereka akan sangat berdosa jika tidak dapat menuntaskan materi yang ada dalam kurikulum. Standar keberhasilan pembelajaran guru kurikulum selalu diukur dari ketuntasan mereka menyampaikan materi pelajaran. Hasil akhirnya adalah peserta didik sukses mengikuti ujian.

Sementara guru inspiratif bersikap tidak terlalu kaku dalam memahami kurikulum. Bagi mereka, kurikulum bukan termasuk kitab suci yang harus selalu diikuti. Kurikulum harus dipahami sebagai sarana mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Karena itu model pembelajaran yang dikembangkan pun menjadi beraneka. Perspektif guru inspiratif terhadap buku teks juga bukan segala-galanya. Buku teks hanya salah satu sumber belajar. Masih banyak media yang dapat dijadikan sumber belajar. Dengan keyakinan yang kuat, maka menjadi pantangan bagi guru inspiratif untuk menangisi keadaan jika di sekolahnya tidak tersedia buku teks dan perangkat informasi teknologi (IT). Sebab, alam sekitar dan barang-barang bekas pun dapat dijadikan laboratorium untuk menunjang proses pembelajaran.

Jika kita mencermati ketimpangan mutu pendidikan yang ada di perkotaan, pedesaan, dan pedalaman, maka kehadiran guru inspiratif jelas sangat dibutuhkan. Melalui guru inspiratif ini kita berharap ada percepatan pemerataan mutu pendidikan. Anak-anak cerdas yang ada di pedesaan dan pedalaman akan mampu menunjukkan talentanya apabila dibimbing guru inspiratif. Ini berarti posisi guru inspiratif se-

bagai ujung tombak pembelajaran mutlak diperlukan.

Dalam konteks inilah kita diingatkan pernyataan Jean Jever, seorang pakar pendidikan dari Perancis. Dia menyatakan bahwa untuk menjadi seorang guru, maka tidak cukup jika hanya bermodal kemauan dan kepintaran. Lebih dari itu, seorang guru harus menampilkan diri secara utuh layaknya pendidik. Ia harus menampilkan diri sebagai sumber ilmu, sahabat, orang tua, teladan, dan inspirasi bagi peserta didiknya. Ini berarti seorang guru tidak hanya dituntut untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Yang juga penting adalah guru harus menjadi teladan sehingga peserta didik memiliki rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru.

Seorang guru akan menginspirasi peserta didik jika mampu keluar dari pakem pembelajaran yang dibebankan kurikulum. Ini berarti untuk menjadi guru inspiratif harus dimulai dengan melakukan perubahan metodologi pembelajaran. Menurut teori pendidikan, pembelajaran yang baik adalah yang menarik hati peserta didik (*pull*). Karena itu sangat tepat jika dikatakan bahwa proses pendidikan adalah memberikan sebagian hati pada peserta didik. Sebaliknya, pendidikan akan dianggap kurang berhasil jika melahirkan tekanan (*push*) pada peserta didik. Akibatnya, peserta didik tidak memiliki keberanian dan rasa percaya diri untuk mengembangkan daya imajinasinya. Padahal salah satu tugas guru adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan.

Pendidikan yang terlalu mengekang dan memberikan tekanan pasti akan melahirkan perasaan rendah diri anak. Padahal menurut hasil penelitian dikatakan bahwa perasaan rendah diri yang dialami orang dewasa sangat berkaitan dengan pola pembelajaran yang dialami orang itu tatkala belajar pada masa anak-anak. Bahkan pengaruhnya bisa mencapai 90 persen. Hal ini menunjukkan betapa pola pembelajaran

yang dikembangkan guru turut berpengaruh untuk membentuk karakter anak. Karena itulah keberadaan guru inspiratif sangat dibutuhkan di tengah miskinnya prestasi dunia pendidikan nasional di level internasional.

Rasanya kita bersepakat jika dikatakan bahwa ujung tombak pendidikan itu adalah guru. Ini sejalan dengan pernyataan Edward Sallis dalam *Total Quality Management in Education* (2006); *recovery begins with teachers*. Jika kita ingin melihat terwujudnya pendidikan yang bermutu, maka kuncinya adalah guru. Tetapi harus diingat, bahwa pendidikan bermutu merupakan perburuan yang tak bertepi.

Dalam istilah manajemen, ikhtiar menuju pendidikan bermutu harus dilakukan terus-menerus (*continuous improvement*). Sallis juga mengingatkan agar keinginan memperbaiki mutu pendidikan itu menjadi “gerakan” semua elemen. Pada konteks inilah seluruh *stakeholder* pendidikan, termasuk pemerintah dan kekuatan *civil society*, harus memfasilitasi agar jumlah guru inspiratif semakin banyak.

GURU SENANG MENULIS

Menulis bagi sebagian orang barangkali bukan pekerjaan mudah. Apalagi jika tulisan itu adalah karya ilmiah dengan standar dan kualifikasi tertentu. Bagi orang yang berkiprah di dunia pendidikan, seperti guru, kegiatan menulis harus dipandang sebagai bagian dari tugas. Tetapi, faktanya banyak guru yang tidak memiliki kemampuan untuk menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Berbeda jika misalnya diminta menyampaikan ide secara lisan, bisa berbicara sangat lancar dan dalam waktu berjam-jam. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya dialami para guru. Di perguruan tinggi juga sering dijumpai dosen yang sangat memukau jika berbicara, sementara ketika diminta menulis kurang mampu.

Minimnya kemampuan guru untuk menulis menjadikan mereka miskin publikasi ilmiah. Akibat miskin karya ilmiah itulah para guru mengalami hambatan dalam menempuh karir dan kenaikan pangkat. Bahkan mereka harus rela pangkatnya terhenti di golongan IV/a. Data dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 2005 menunjukkan bahwa dari 1.461.124 guru, jika ditinjau dari golongan/ruang kepangkatan guru, hanya 22,87 persen (IV/a), 0,16 persen (IV/b), 0,006 persen (IV/c), 0,001 persen (IV/d), dan 0,00 persen (IV/e).

Data tersebut menunjukkan betapa sedikit guru yang mampu melampaui golongan IV/a. Sebab, untuk dapat mengurus pangkat lanjutan, guru harus menyertakan sejumlah karya ilmiah dan penelitian tindakan kelas (*action research*). Hal ini sungguh menyedihkan, sebab semestinya guru dapat menjadikan karya ilmiah sebagai media untuk mendialogkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Melalui publikasi ilmiah itulah diharapkan terjadi *sharing* yang memungkinkan para guru dapat berbagi pengalaman.

Publikasi ilmiah dan PTK para guru sangat berkaitan dengan fasilitas perpustakaan dan dukungan dana. Keadaan perpustakaan yang masih memperhatikan menyebabkan guru kesulitan memperoleh referensi yang dibutuhkan. Dukungan dana untuk kegiatan PTK juga tidak pernah muncul dalam RAPB sekolah. Target sekolah yang berlebih dan minimnya kesejahteraan guru juga menjadi faktor yang menyebabkan tradisi menulis dan meneliti kurang populer di mata guru.

Faktor lain yang juga penting adalah bahwa ternyata tidak banyak sekolah yang memiliki majalah atau jurnal. Padahal melalui majalah dan jurnal itulah para guru dapat mengaktualisasikan idenya. Apalagi jika majalah dan jurnal itu memiliki ISSN dan berstatus terakreditasi, maka publikasi ilmiah yang dimuat jelas akan memiliki nilai cukup besar untuk kenaikan pangkat. Penerapan IT, termasuk layanan internet, juga sangat bermanfaat bagi guru guna meningkatkan wawasan.

Keengganan guru untuk menulis dan meneliti juga dikarenakan mereka merasa nyaman dengan apa yang dilakukan selama ini. Kondisi ini terbentuk memang tidak mutlak kesalahan guru. Sebab, kultur di sekolah juga terkadang tidak banyak menuntut perubahan. Akibatnya, banyak guru yang merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki. Faktor inilah yang menyebabkan minat guru untuk menulis dan meneliti sangat rendah. Hal ini jelas ber-

beda dengan dunia perguruan tinggi yang selalu menuntut setiap dosen untuk terus meng-*up grade* ilmu pengetahuannya.

Pemberlakuan Undang-undang tentang Guru dan Dosen (UU Nomor 14 tahun 2005) telah memberikan harapan besar untuk menumbuhkan minat guru agar senang menulis dan meneliti. Program sertifikasi yang sedang berlangsung secara nasional juga dapat merangsang minat guru untuk menghasilkan karya ilmiah. Ini karena aktivitas menulis karya ilmiah dan PTK mendapatkan porsi yang besar dalam penilaian berbasis portofolio.

Di samping itu, penting juga dikemukakan beberapa program pemerintah untuk mendukung guru agar senang menulis dan meneliti. Selama tahun 2007, pemerintah telah meluncurkan beberapa program peningkatan profesionalitas guru dan pemberian *grant* untuk kegiatan; (1) PTK untuk 3.837 guru dengan alokasi dana Rp. 13.653.600.000,-; (2) bimbingan karya tulis ilmiah bagi 10.000 guru dengan alokasi dana Rp. 50 miliar; dan (3) pertemuan ilmiah guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Bahkan pemerintah juga memberikan hak cuti pada guru yang melaksanakan penelitian dan penulisan buku.

Dengan berbagai fasilitas tersebut rasanya tidak boleh lagi ada alasan bagi guru untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Dengan kata lain, kultur menulis dan meneliti harus mulai tumbuh dalam diri guru.

MENINGKATKAN MUTU GURU

Ada kata hikmah yang terkenal ketika kita membicarakan peran penting guru. Yakni, *al-thariqatu ahammu min al-maddah wa al-mudarrisu ahammu min al-thariqah*. Kata hikmah ini berarti bahwa metode itu lebih penting dari materi pelajaran dan guru itu jauh lebih penting dari metode pembelajaran. Ungkapan ini menunjukkan bahwa guru sebagai ujung tombak pembelajaran memiliki posisi yang signifikan. Bahkan metode pembelajaran yang paling canggih sekalipun tidak akan efektif jika dipraktikkan guru yang tidak bermutu (*underqualified*).

Karena memegang posisi yang menentukan, maka tidak mengherankan jika guru sering disalahkan ketika peserta didik tidak memperoleh hasil memuaskan saat Ujian Nasional (UN). Terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan peserta didik untuk meraih hasil terbaik UN, rasanya tidak salah jika kita mengoreksi mutu guru. Mutu guru memang bukan penentu keberhasilan atau kegagalan peserta didik menjalani UN. Faktor lain yang layak disebut adalah kemampuan peserta didik dan dukungan orang tua. Kemampuan peserta didik layak dikemukakan karena berkaitan dengan modal dasar yang dimiliki untuk mengerjakan soal UN. Sementara dukungan orang tua sangat berarti

untuk membesarkan hati peserta didik (*encouragment*) agar dapat menjalani UN dengan tenang.

Faktor lain yang juga layak dikemukakan adalah kejujuran. Persoalan ketidakjujuran ini dari tahun ke tahun selalu mewarnai pelaksanaan UN. Praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) potensial dilakukan peserta didik, guru, dan mentor dari lembaga bimbingan belajar. Karena terjadi ketidakjujuran, maka orang lantas mempersoalkan kredibilitas UN.

Praktik ketidakjujuran ini semakin menjadi dikarenakan ada banyak kepentingan di luar pendidikan yang turut bermain. Misalnya, pejabat publik sekelas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota turut memerintahkan dinas pendidikan agar menyukseskan UN. Dalam alam pikiran mereka, kesuksesan UN pasti dapat mendongkrak citranya sebagai pejabat publik. Dinas pendidikan pun memerintahkan kepala sekolah, yang direspon dengan membentuk tim sukses yang beranggotakan para guru. Tim inilah yang bertanggung jawab untuk menyukseskan UN.

Mengapa seorang guru akhirnya berlaku tidak jujur saat UN? Jawabannya, seorang guru jelas tidak mau disalahkan dengan jebloknya nilai UN. Maka, seorang guru pun mau melakukan apa saja agar peserta didik lulus. Dari sinilah praktik ketidakjujuran itu dimulai. Biasanya tekanan terhadap kesuksesan UN sangat dirasakan oleh guru kelas IX (SMP/MTs) dan guru kelas XII (SMA/SMK/MA). Karena itulah banyak guru yang enggan mengajar di kelas akhir. Padahal UN seharusnya juga menjadi tanggung jawab guru kelas lain dikarenakan muatan materi yang diujikan berasal dari kelas di bawahnya.

Ketakutan guru terhadap UN seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, jika guru telah melakukan proses belajar

dan mengajar dengan baik, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seorang guru harus menyadari bahwa soal yang diujikan dalam UN berasal dari materi yang diajarkan di kelas. Ini berarti, jika terjadi ada banyak peserta didik yang tidak lulus, maka yang layak dipertanyakan adalah mutu proses pembelajarannya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya ada hubungan kausalitas antara mutu proses pembelajaran guru di kelas dengan keberhasilan peserta didik dalam menjalani UN. Hubungan sebab akibat inilah yang seringkali tidak disadari guru.

Diduga kuat faktor utama ketidaklulusan peserta didik dikarenakan banyak guru yang menjalankan proses belajar mengajar tidak berdasar pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ditentukan. Akibatnya, ketika ujian dilaksanakan banyak peserta didik mengalami kesulitan. Padahal soal UN didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), SK, dan KD yang ada pada setiap mata pelajaran. Berkaitan dengan persoalan ini maka pemerintah dituntut untuk meningkatkan mutu guru. Bahkan jika diperlukan guru harus diajari memahami SK dan KD setiap mata pelajaran sehingga dapat menunaikan tugas pembelajaran dengan baik. Bukankah pemerintah selalu mengatakan bahwa UN penting dilaksanakan untuk memetakan mutu pendidikan?

SPIRIT LASKAR PELANGI UNTUK REFORMASI PENDIDIKAN

Pernahkah Anda menonton film Laskar Pelangi? Film Laskar Pelangi telah banyak menarik minat masyarakat, utamanya para aktivis dunia pendidikan. Film yang diangkat dari novel *best seller* Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini sungguh sangat inspiratif dan menakjubkan. Laskar Pelangi menghadirkan cerita yang sangat mengharukan tentang dunia pendidikan dengan tokoh-tokoh manusia sederhana, jujur, tulus, gigih, penuh dedikasi, ulet, sabar, tawakal, dan bertakwa. Lebih dari itu dapat dikatakan bahwa Laskar Pelangi telah berhasil memotret fakta pendidikan sekaligus ironi dunia korporasi di tengah komunitas kaum yang terpinggirkan.

Cerita Laskar Pelangi menghadirkan kisah tentang perjuangan dua orang guru SD Muhammadiyah Belitong (Pak Harfan dan Bu Muslimah) yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan. Dengan segala keterbatasan fasilitas yang dimiliki, Pak Harfan dan Bu Mus telah memberikan pelajaran bahwa pendidikan adalah memberikan hati pada peserta didik, bukan sekedar memberikan instruksi, komando, dan bahkan perintah.

Setiap anak pasti memiliki potensi unggul yang akan tumbuh menjadi prestasi cemerlang apabila diberi kesempatan dan keteladanan oleh orang-orang yang mengerti makna pendidikan. Pak Harfan dan Bu Mus telah mampu menjadi pendidik yang sesungguhnya, bukan sekedar pengajar yang melakukan transformasi ilmu pengetahuan. Di dalam diri keduanya terkumpul kemauan, kemampuan, keteladanan, kerja keras, kesabaran, pantang menyerah, dan keikhlasan.

Kisah dan perjuangan Pak Harfan dan Bu Mus dalam cerita *Laskar Pelangi* juga menuntut para guru mampu menjawab beberapa pertanyaan instruksional dalam pembelajaran. Pertanyaan yang dimaksud adalah (1) *What educational purpose should the school seek to attain?*; (2) *What educational experiences can be provided that are likely to attain the purpose?*; (3) *How can these educational experiences be effectively organized?*; (4) *How can we determine whether these purposes are being attained?* Inti dari pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Pertanyaan kedua menanyakan pengalaman yang hendak diberikan melalui proses pembelajaran. Pertanyaan ketiga berkaitan dengan pengorganisasian yang efektif terhadap beberapa pengalaman yang diperoleh peserta didik. Sementara pertanyaan terakhir menanyakan proses penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pertanyaan tersebut perlu dijawab para guru. Sebab, seringkali peserta didik tidak merasa memiliki manfaat apa pun dari pembelajaran yang dialami di sekolah. Maka penting direnungkan apakah pembelajaran yang dilakukan para guru selama ini telah memberikan makna dan manfaat bagi peserta didik. Tentu saja, pengertian makna dan manfaat dalam hal ini adalah nilai guna dari pendidikan di bangku sekolah setelah peserta didik lulus.

Dalam konteks inilah seringkali kita mengamati bahwa selalu ada kesenjangan antara pembelajaran di kelas dan tantangan kehidupan yang dihadapi peserta didik. Peserta didik selalu merasa tidak dapat berbuat banyak ketika berhadapan dengan problematika kehidupan sehari-hari. Maka pembelajaran yang bermakna (*meaningful*) adalah yang mampu memberikan kecakapan hidup (*life skill*) sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk mengatasi problem yang dihadapi. Dalam hal ini, Pak Harfan dan Bu Mus dengan dibantu oleh laboratorium alam telah mampu menanamkan kesadaran pada anggota Laskar Pelangi untuk tidak pernah berputus asa menghadapi problem kehidupan.

Melalui kisah Laskar Pelangi para guru juga mendapatkan pelajaran bahwa setiap peserta didik pasti memiliki potensi. Karena itu tugas guru adalah memberikan penghargaan dan terus membimbing sehingga dapat tumbuh menjadi prestasi yang cemerlang di masa depan. Pelajaran ini dapat diamati melalui potensi dan kecerdasan yang dimiliki sepuluh peserta didik yang dikenal dengan Laskar Pelangi, seperti Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, dan A Ki-ong. Bahkan Harun yang *invalid* secara fisik dan non-fisik juga mendapatkan hak untuk dihargai dan dibimbing.

Anggota Laskar Pelangi telah mampu menunjukkan prestasi gemilang pada masanya karena memang selalu diberi kesempatan oleh Pak Harfan dan Bu Mus untuk berekspresi. Maka sekali lagi kita melihat betapa dua pahlawan tanpa tanda jasa ini mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan mengembangkan daya imajinasi, kreasi, inovasi, nalar, rasa ingin tahu, serta eksperimentasi untuk menemukan hal-hal baru pada para peserta didik.

Apa yang ditampilkan dalam kisah Laskar Pelangi sekaligus menjadi kritik terhadap metode pembelajaran sebagian

guru yang masih bersifat *teacher center* (berpusat pada guru), *information delivery* (pemberian informasi), *single media* (media tunggal), dan *push* (menekan). Padahal pendidikan saat ini sudah harus berubah menjadi *student center* (berpusat pada peserta didik), *information exchange* (saling tukar informasi), menggunakan multimedia (termasuk menggunakan kekayaan alam sebagai laboratorium), dan *pull* (menarik).

Sebagai contoh, dikatakan bahwa pembelajaran harus berubah dari bersifat *push* ke *pull*. Hal ini penting dilakukan para guru agar tidak ada perasaan tertekan yang dialami peserta didik. Pembelajaran harus ditampilkan dengan cara yang menarik hati, membebaskan, mengajak peserta didik terlibat aktif, menyenangkan, dan menumbuhkan inspirasi untuk mendapat pengetahuan lebih banyak.

Sama dengan novelnya, film *Laskar Pelangi* telah berhasil memotret realitas pendidikan dan ironi dunia korporasi di tengah komunitas kaum pinggiran. Semua orang yang telah membaca novel *Laskar Pelangi* atau melihat filmnya pasti sangat tergugah dan termotivasi untuk mensyukuri hidup. Bahwa ternyata masih banyak anak bangsa yang belum memperoleh layanan pendidikan sebagaimana mestinya.

Kisah *Laskar Pelangi* juga menghadirkan pelajaran penting untuk membangun nilai-nilai multikulturalisme. SD Muhammadiyah Belitong, yang menjadi *setting* sosial pasukan *Laskar Pelangi* berinteraksi telah membuka kesempatan seluas-luasnya pada warga masyarakat lintas agama dan etnis untuk memperoleh layanan pendidikan. Tengoklah peserta didik keturunan Cina seperti A Kiong dan Harun yang cacat fisik dan mental. Mereka telah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang sama. Multikulturalisme dalam hal ini dapat dipahami sebagai usaha untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan beragam komu-

nitias dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing. Lembaga pendidikan sebagai bagian dari ruang publik juga harus didorong untuk menjadi tempat persemaian nilai-nilai multikulturalisme.

Pelajaran mengenai multikulturalisme yang harus disemai sejak anak-anak tumbuh dan berkembang di dunia pendidikan mutlak diperlukan. Sebab, realitas masyarakat menunjukkan adanya pluralitas etnis, kultur, dan agama. Harus diakui bahwa persoalan pluralitas (kemajemukan) hingga kini masih menjadi problem yang cukup pelik. Maka penanaman nilai-nilai multikulturalisme di kalangan peserta didik jelas merupakan investasi jangka panjang dengan harapan agar mereka kelak dapat memiliki kultur untuk dapat hidup secara harmonis dalam komunitas yang majemuk.

Akhirnya, Pak Harfan, Bu Mus, dan pasukan Laskar Pelangi telah menunjukkan pada kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dapat dicapai asalkan ada kemauan, kerja keras, dan kesabaran. Prinsip “selalu memberi sebanyak-banyaknya dan tidak menerima sebanyak-banyaknya”, dari Pak Harfan dapat dijadikan spirit bagi guru Muhammadiyah. Kecerdasan, kesabaran, kesungguhan, dan keikhlasan Bu Mus juga dapat dijadikan inspirasi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Para peserta didik Muhammadiyah juga dapat menjadikan pasukan Laskar Pelangi sebagai teladan untuk mewujudkan citat-cita setinggi langit dengan cara giat belajar dan kerja keras.

Mudah-mudahan kita dapat memperoleh spirit dari kisah Laskar Pelangi untuk mereformasi pendidikan.

IRONI PEMERASAN TERHADAP GURU

Kasih sekali nasib para guru. Pahlawan tanpa tanda jasa ini terus dijadikan sasaran pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Modusnya, para guru dijanjikan lulus uji kompetensi awal (UKA) dengan syarat memberikan imbalan uang. Sebagai tahap awal untuk menyaring guru yang akan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), UKA sangat potensial dijadikan media untuk memeras guru. Karena itu, para guru harus mewaspadaikan praktik pemerasan terselubung dalam pelaksanaan UKA.

Di beberapa daerah para guru juga menjadi sasaran pungutan liar saat menerima tunjangan profesi pendidik (TPP). Berdalih untuk tasyakuran atau peningkatan mutu, para guru harus merelakan sebagian TPP-nya dipotong. Padahal untuk memperoleh TPP, mereka harus berjuang dalam waktu sangat lama. Dimulai dari usaha untuk bisa masuk *data base* guru tersertifikasi, selanjutnya berjuang untuk lulus saat mengikuti UKA. Guru yang dinyatakan lulus baru berhak untuk mengikuti PLPG. Sementara yang tidak lulus harus menunggu antrian untuk didaftar sebagai peserta UKA.

Proses PLPG yang melelahkan pun harus dijalani guru selama sehari-hari. Pada tahap akhir PLPG, para guru harus menjalani tes untuk menentukan kelulusan. Belum tentu semua guru lulus tes. Bagi yang lulus, otomatis akan menerima sertifikat sebagai guru tersertifikasi. Sebaliknya, guru yang tidak lulus, berarti harus mengikuti rangkaian tes ulang hingga dinyatakan lulus. Begitulah jalan panjang yang harus dilalui guru sehingga berstatus tersertifikasi dan berhak memperoleh TPP.

Proses untuk mencairkan tunjangan profesi guru ternyata tidak mudah. Guru harus sabar menunggu, paling tidak dua hingga tiga tahun. Proses administrasi yang berbelit dan pembukaan nomor rekening di bank menjadi penyebab lamanya pencairan. Jika sudah keluar, TPP juga belum tentu terbayar secara rutin. Tunjangan profesi guru terkadang dirapel setiap enam bulan atau bahkan setahun sekali. Ini berarti perjuangan guru untuk mendapatkan tunjangan profesi terasa sangat berat dan berliku. Karena itu, sangat ironi jika ada pihak yang dengan tega melakukan pemerasan pada guru.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hingga 2011, jumlah guru tersertifikasi mencapai 746.727 (25,5 persen) dari total 2.925.676 guru. Dari guru bersertifikat itu, 731.002 (97,9 persen) telah menerima tunjangan profesi. Jumlah guru tersertifikasi yang begitu besar tentu potensial dijadikan sasaran pemerasan.

Apalagi guru seringkali tidak memiliki pilihan karena pemerasan itu diduga melibatkan pengurus kelompok kerja kepala sekolah (K3S) dan Musyawarah Kerja Kepala Madrasah (MKKM). Sangat mungkin pengurus K3S dan MKKM ini bergerak karena mendapat perintah dari oknum di unit pelaksana tugas dinas (UPTD) pendidikan di

setiap kecamatan. Fakta inilah yang perlu dilacak karena menurut pengakuan beberapa guru, uang hasil pungli itu dibagikan pada pengurus K3S, MKKM, dan UPTD.

Peningkatan kesejahteraan melalui pemberian tunjangan profesi jelas dimaksudkan agar guru selalu meng-*upgrade* wawasan dan keterampilannya. Diharapkan pada saatnya kita menyaksikan para guru bergerak dari kondisi tidak bermutu (*under qualified*) menjadi bermutu (*qualified*). Dengan guru yang bermutu, maka sistem pendidikan diharapkan akan semakin berkualitas dan berdaya saing di level internasional. *Education International* (EI) mengidentifikasi kompetensi utama yang harus dimiliki guru meliputi pengetahuan, kemampuan pedagogi, komunikasi, perilaku, dan nilai. Ini berarti guru harus didorong meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasinya sehingga menjadi guru profesional.

Tidak bisa dipungkiri, guru memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan. Guru merupakan faktor terpenting dalam meraih kesuksesan pembelajaran dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Metode pembelajaran yang paling canggih sekalipun tidak akan efektif jika dipraktikkan guru yang tidak bermutu. Karena itu sudah selayaknya program pemerintah diorientasikan untuk meningkatkan mutu guru.

Mengingat pentingnya posisi guru dalam keseluruhan sistem pendidikan, maka semua pihak seharusnya memberikan dorongan pada guru untuk meningkatkan mutu. Diantara cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Ini perlu ditekankan karena seringkali pemerintah dan masyarakat menuntut perbaikan kinerja guru, tetapi kesejahteraan mereka diabaikan.

Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan guru mulai dirasakan seiring dengan kebijakan untuk memberikan tunjangan profesi yang digulirkan pemerintah sejak 2007 silam. Bahkan di beberapa daerah, pemerintah juga memberikan insentif tambahan bagi guru di luar gaji dan tunjangan profesi.

Tujuan dari beberapa ikhtiar tersebut adalah meningkatkan mutu guru. Sebab, selalu ada korelasi yang positif antara kesejahteraan dengan peningkatan kinerja. Selain perbaikan kesejahteraan, program peningkatan wawasan dan keterampilan guru juga harus terus digulirkan. Untuk itulah pemerintah dan *stakeholder* pendidikan harus melakukan kegiatan berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, workshop, pendampingan, dan forum ilmiah lainnya yang memungkinkan para guru meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Kita harus menyadari, bahwa jantung pendidikan itu sejatinya ada di kelas. Itu berarti para guru memiliki peranan yang teramat penting untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar bermutu. Untuk itulah dibutuhkan guru berdedikasi tinggi. Rasanya dedikasi itu akan muncul jika para guru terbebas dari beban hidup. Pada konteks ini perbaikan kesejahteraan guru mutlak diperlukan.

GURU BANTU DIANGKAT PNS

Pengangkatan guru bantu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk ditempatkan di sekolah negeri pasti disambut suka cita oleh para guru bantu. Hal ini dikarenakan mereka telah mengabdikan sekian lama dan berjuang untuk mendapatkan status PNS. Dengan berstatus PNS, berarti mereka memiliki kejelasan nasib, karir, dan kesejahteraan. Jika selama menjadi guru bantu mereka hanya mendapatkan penghasilan yang tidak seberapa, maka begitu diangkat PNS, jaminan kesejahteraan mereka pun dipastikan meningkat. Seperti PNS lain, mereka pun berhak mendapatkan berbagai fasilitas termasuk tunjangan pensiun di akhir purnatugas nanti.

Berbeda dengan guru bantu yang diangkat PNS, sekolah swasta yang menjadi tempat tugas mereka harus berduka cita. Yang membuat sekolah swasta bersedih adalah karena sebagian besar guru bantu adalah guru senior dan guru terbaik di sekolahnya. Begitu guru bantu ini sudah “jadi”, mereka diangkat PNS dan tidak ditempatkan di sekolah asalnya. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa penempatan guru bantu yang diangkat PNS di sekolah negeri telah menyisakan persoalan bagi sekolah swasta. P persoalan akan menjadi lebih kompleks jika yang mengalami adalah sekolah swasta berkategori kecil dan memiliki banyak keterbatasan.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) memang telah membuat peraturan meniadakan status guru PNS yang diperbantukan (DPK) di sekolah swasta. Peraturan ini dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk menempatkan guru bantu di sekolah negeri. Dengan dalih pemerintah yang mengangkat PNS, maka mereka yang diangkat pun harus ditempatkan di sekolah negeri.

Maka jika ada sekolah swasta yang meminta agar pemerintah menempatkan guru bantu yang diangkat PNS di sekolah asalnya, pemerintah pun tetap kukuh pada pendiriannya. Dalam kasus penempatan guru bantu pemerintah pun bersikap seperti iklan di media; “Shogun *kok* dilawan (pemerintah *kok* dilawan)”. Sikap ini jelas menunjukkan tiadanya empati pemerintah terhadap sekolah swasta. Padahal selama ini swasta telah membantu pemerintah dalam melaksanakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peraturan MenPAN bagi sekolah swasta berkategori kecil jelas sangat memberatkan. Sebab, selama ini keberadaan guru PNS berstatus DPK sangat bermanfaat. Sekolah swasta dapat mempekerjakan mereka tanpa harus mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji. Kalaupun ada tambahan penghasilan yang diberikan biasanya hanya transportasi dan gaji yang diperoleh dari kelebihan jam mengajar. Demikian juga dengan guru bantu yang ditempatkan di sekolah swasta, perguruan swasta pun tidak harus repot menggaji mereka sebab pemerintah sudah menganggarkan melalui APBN dan APBD. Karena itu, ketika guru bantu ini diangkat PNS dan tidak ditempatkan di sekolah swasta, maka pihak pengelola pun meradang.

Untuk sekolah swasta berkategori besar dan mapan memang tidak membutuhkan guru DPK dan guru bantu. Bahkan sekolah ini dengan gagah mampu menolak guru DPK dan guru bantu. Hal ini karena yang dipentingkan sekolah

swasta berkategori besar dan mapan adalah ketaatan, tanggung jawab, dan pengabdian. Beberapa sifat yang disebutkan ini biasanya tidak dimiliki oleh guru DPK dan guru bantu karena mereka merasa digaji pemerintah. Tentu tidak semua guru DPK dan guru bantu bersifat demikian.

Beberapa sekolah swasta yang mapan pun menerapkan standar kepegawaian dan kesejahteraan layaknya PNS. Bahkan beberapa sekolah swasta yang sangat mapan, kesejahteraan gurunya jauh lebih baik dari PNS. Ini semua dilakukan untuk menumbuhkan komitmen para guru. Tetapi, sangat disayangkan jumlah sekolah swasta berkategori besar dan mapan tidak banyak. Mayoritas sekolah swasta adalah kelas pinggiran sehingga masih banyak bergantung bantuan pemerintah.

Pengangkatan guru bantu menjadi PNS juga menghadirkan problem bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan guru PNS di sekolah negeri. Mereka khawatir karena jumlah jam mengajarnya akan berkurang. Hal ini dapat dipahami karena standar minimal jam mengajar yang ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah 24 jam. Tetapi, sekali lagi, yang merasa sangat kehilangan tentu sekolah swasta yang ditinggalkan. Mereka sedih karena harus mulai melakukan pembinaan dari nol lagi. Maka dalam kasus ini kiranya perlu dipertanyakan empati pemerintah terhadap sekolah swasta.

RAPERDA UMG DAN KESIAPAN SWASTA

Melalui forum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), para penyelenggara pendidikan swasta menyatakan berkeberatan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Upah Minimum Guru (Raperda UMG). Draf Perda UMG diajukan oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Salah satu poin penting yang diperdebatkan dalam draf Perda UMG adalah gaji minimal guru yang mencapai Rp. 1,1 juta perbulan.

Selain itu, ada kewajiban penyelenggara pendidikan swasta untuk membayar kelebihan jam mengajar guru jika melebihi 24 jam. Semangat yang diusung Raperda UMG adalah mengatur sistem penggajian guru. Bagi Dispendik, peraturan ini perlu dibuat dengan harapan ada kesepakatan para penyelenggara pendidikan untuk menentukan gaji minimal guru. Raperda UMG jelas menjadi angin segar bagi guru, terutama yang mengajar di pendidikan swasta berkategori menengah ke bawah.

Jika ditelisik lebih jauh, rasanya masih banyak guru, terutama guru tetap yayasan, yang masih menerima penghasilan di bawah upah minimum regional kota dan provinsi yang diberlakukan untuk buruh pabrik. Padahal tugas guru

dilukiskan dengan kalimat yang begitu menterang; mencekak manusia Indonesia seutuhnya, berkarakter kuat, dan berdaya saing tinggi. Posisi guru juga sangat vital untuk menjadikan pendidikan bermutu. Pertanyaan yang layak diajukan; Bagaimana mau berbicara mutu pendidikan jika problem yang berkaitan dengan kebutuhan minimal guru belum terpenuhi? Tampaknya, pertimbangan inilah yang mendasari Dispendik mengajukan Raperda UMG.

Berbeda dengan guru, Raperda UMG jelas menjadi persoalan bagi penyelenggara pendidikan swasta. Tentu bukan hanya persoalan istilah “upah minimal guru” yang patut diperdebatkan. Ada problem yang lebih besar, yaitu kewajiban penyelenggara pendidikan untuk memenuhi standar minimal gaji guru. Ini baru pengeluaran rutin di luar operasional pendidikan. Padahal penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan lembaga pendidikan agar dapat bertahan dan berkompetisi dengan lembaga lain.

Maka, dapat dibayangkan betapa pusing kepala para penyelenggara pendidikan jika Raperda UMG ini benar-benar diundangkan. Sejujurnya, penyelenggara pendidikan bukan tidak mau meningkatkan kesejahteraan guru. Mereka sangat menyadari kecilnya pendapatan guru. Problemnya adalah kebanyakan sekolah swasta mengandalkan donasi pendidikan dari orang tua peserta didik. Untuk sekolah swasta berkategori besar memang tidak masalah, tetapi untuk sekolah berkategori kecil dengan jumlah peserta didik sedikit tentu menjadi masalah besar.

Di luar problem yang dihadapi sekolah swasta, rasanya Raperda UMG juga perlu disinkronkan dengan peraturan lain yang mengatur donasi pendidikan. Sebab, Dispendik Surabaya pernah melarang sekolah menarik donasi dari wali peserta didik. Setali tiga uang, Bambang DH, Walikota Surabaya, juga

menyalahkan sekolah-sekolah yang masih menarik donasi. Bagi sekolah negeri, persoalan donasi pendidikan memang jadi isu sensitif. Ini karena sebagai sekolah negara, berarti segala pembiayaan yang dikeluarkan sudah dipenuhi oleh pemerintah.

Masyarakat akan menyatakan tidak lazim jika ada sekolah negeri yang membebankan biaya operasional pendidikan pada orang tua. Padahal dalam beberapa kasus, donasi pendidikan yang melibatkan sekolah negeri selalu berdalih karena dana dari pemerintah belum memenuhi semua kebutuhan. Jika sekolah negeri saja begitu, bagaimana dengan pendidikan swasta?

Dispendik Surabaya beralasan bahwa secara logika penyelenggara pendidikan swasta pasti mampu memenuhi UMG. Sebab, pemerintah telah banyak meluncurkan program bantuan pendidikan. Misalnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda). Tetapi, karena besaran dana yang diberikan bergantung pada jumlah peserta didik, maka penerimaan BOS dan Bopda pun berbeda untuk setiap sekolah. Tampaknya, inilah problem yang dihadapi penyelenggara pendidikan swasta. Bagi mereka, tidak mungkin pembiayaan UMG dan kebutuhan operasional lain hanya mengandalkan BOS dan Bopda.

Sebenarnya, masih ada jalan keluar bagi penyelenggara pendidikan swasta agar dapat memenuhi UMG. Yakni, dengan jalan memanfaatkan sumber daya stakeholder sekolah, yang dapat dijalankan oleh Komite Sekolah. Untuk memobilisasi sumberdaya stakeholder memang tidak mudah. Diperlukan perjuangan dan bukti empirik berupa penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah secara profesional. Jika donasi dari stakeholder keluar, penyelenggara juga harus memberikan pertanggungjawaban secara transparan pada semua stakeholder sekolah.

menikmati permainan dan untuk sementara melupakan perbedaan latar belakang sosial budayanya. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sepak bola dapat digunakan sebagai media untuk menciptakan pembauran antar warga (*melting pot*).

Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan sehingga kesadaran multikulturalisme harus ditumbuhkan. Haryatmoko (2007) menyebutkan tiga hal yang menjadikan multikulturalisme mutlak diperlukan. *Pertama*, adanya fenomena penindasan atau penafian atas dasar agama, etnis, dan budaya. Dikotomi antara “kita” (kelompok dominan) dan “mereka” (di luar kelompok dominan) seringkali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini banyak terjadi di wilayah publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan publik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, maka kelompok minoritas terus ditekan sehingga kehilangan eksistensi.

Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memarginalkan kelompok tertentu dengan memberi label “tidak terlalu penting” dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri semakin terpatrit dalam struktur kesadaran kelompok minoritas. Pada konteks inilah multikulturalisme hendak menjawab kebutuhan dasar kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya.

Ketiga, kaum urban dan migran seringkali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak undang-undang otonomi daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah seringkali disalahartikan dengan pemihakan terhadap kepentingan warga asli atau pribumi. Akibatnya, terjadi diskriminasi ter-

hadap warga pendatang. Rekrutmen pejabat publik pun tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan asal daerah.

Berdasarkan tiga argumen tersebut maka kesadaran multikulturalisme perlu terus digelorakan agar tumbuh sikap saling memahami kekhasan masing-masing. Dan, kekhasan tidak boleh disamakan dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial budaya.

Pelajaran multikulturalisme jelas terasa sekali dalam permainan sepak bola. Semua pemain yang berlaga bahu-membahu dan saling membantu sehingga tidak tampak budaya yang mendominasi. Penonton juga dapat menikmati pertandingan dan memberikan dukungan penuh pada pemain. Meski sejuknya harus diakui bahwa antar pemain dan penonton sejatinya memiliki perbedaan sosial budaya. Hal ini menunjukkan betapa penting permainan sepak bola sebagai salah satu media menumbuhkan kesadaran multikulturalisme.

Mengingat begitu penting posisi sepak bola sebagai media menumbuhkan multikulturalisme dan nasionalisme maka sudah saatnya elit PSSI menghentikan pertikaian. Marilah bersatu untuk membangun masa depan sepak bola nasional. Jauhkan urusan sepak bola dari kepentingan politik. Jika diperlukan ajaklah mantan pemain sepak bola untuk terlibat mengelola PSSI. Jika cara ini tidak juga manjur, jangan-jangan kita memang membutuhkan ketua umum PSSI naturalisasi untuk mengurus sepak bola nasional.

SEKOLAH NUNUT

Kasus sekolah nunut kembali hangat dibicarakan seiring dengan masa pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2008/2009. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya jumlah sekolah nunut di metropolis mencapai 86 sekolah. Jumlah ini terhitung mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA, Kejar Paket, hingga universitas. Yang menarik, 46 sekolah di antaranya berada di bawah naungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Fenonema sekolah nunut memang sangat dilematis. Di satu sisi, keberadaannya dalam tingkat tertentu bermanfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kelompok kelas sosial ekonomi rendah. Kelompok masyarakat ini jelas tidak mampu jika harus menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah mapan. Pilihan yang realistis bagi mereka adalah sekolah kelas pinggiran atau sekolah yang melaksanakan pembelajaran di siang hari. Sekolah pinggiran dipilih dengan alasan biaya pendidikan yang murah, sementara sekolah di siang hari dipilih karena pada pagi hari anak-anak dapat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Sementara, pada sisi yang lain, keberadaan sekolah nunut ini sangat mengganggu sekolah induk, yang umumnya

adalah sekolah negeri. Dari perspektif ini, pihak yang paling dirugikan adalah Dispendik yang membawahi sekolah negeri. Apalagi selama ini ditengarai bahwa keberadaan sekolah nunut ini sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi sekolah induk. Dispendik juga akan kesulitan melakukan pembinaan pada sekolah nunut dikarenakan tidak memiliki fasilitas sendiri.

Karena dirasa mengganggu itulah, Dispendik menawarkan solusi penyelesaian dengan alternatif; *Pertama*, sekolah nunut tidak lagi diperbolehkan membuka pendaftaran peserta didik baru pada tahun ini; *Kedua*, sekolah nunut diberikan tenggang waktu dua tahun untuk proses penyelesaian/pelulusan peserta didik; *Ketiga*, jika ingin tetap beroperasi, sekolah nunut diwajibkan menyewa gedung swasta, terutama sekolah swasta yang mengalami penurunan peserta didik.

Tetapi sangat disayangkan, tawaran alternatif Dispendik ini ditolak oleh penyelenggara sekolah nunut. Seperti diutarakan Masmuk, Ketua PGRI Surabaya, bahwa selama bertahun-tahun para penyelenggara sekolah nunut telah berjuang dan membantu tugas negara untuk turut mencerdaskan warga masyarakat.

Dengan menempatkan masyarakat miskin sebagai *market* sekolah, penyelenggara sekolah ini berargumentasi bahwa jika hak operasionalnya dicabut, maka tidak akan ada lagi kelompok masyarakat yang mau peduli dan berempati pada rakyat miskin. Benarkah alasan kemanusiaan itu yang mendorong penyelenggara sekolah nunut untuk tetap bertahan pada keputusannya?

Menjawab pertanyaan tersebut barangkali tidak mudah. Tetapi, hanya dengan menempatkan alasan kemanusiaan untuk memahami kasus pendirian sekolah nunut

juga bukan pandangan yang *fair*. Sebab, para penyelenggara sekolah nunut juga pasti diuntungkan secara ekonomi. Para guru yang berstatus pegawai negeri juga diuntungkan karena mendapatkan “obyekan” mengajar di luar jam dinas. Apalagi dikatakan bahwa 85 persen guru yang mengajar di sekolah-sekolah PGRI berstatus PNS. Keberadaan sekolah nunut juga membantu karena dapat membuka lowongan pekerjaan bagi guru dan karyawan swasta.

Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat pengguna sekolah nunut; Apakah mereka telah memperoleh layanan pendidikan sebagaimana mestinya? Inilah pertanyaan yang penting dijawab oleh para penyelenggara sekolah nunut. Jika mereka memahami sekolah itu sebagai pusat layanan sosial di bidang pendidikan, maka mereka juga harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi peningkatan kualitas pendidikan peserta didik.

Menurut saya, dalam aspek inilah penyelenggara sekolah nunut itu belum mampu menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan. Pada konteks inilah Dispendik sebagai pembuat regulasi berkepentingan mengambil langkah tegas untuk menertibkan sekolah nunut.

Jika penyelenggara sekolah nunut ingin membantu tugas negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang murah tapi berkualitas, maka tidak ada jalan lain kecuali mereka harus melakukannya dengan serius dan tanggung jawab. Keseriusan dan tanggung jawab itu salah satunya harus ditunjukkan melalui penyediaan fasilitas dan sumberdaya yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Setiap penyelenggara sekolah harus memiliki gedung, ruangan kelas, lapangan olah raga, laboratorium, perpustakaan, dan tenaga sumberdaya manusia yang handal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Merasa tidak banyak memiliki pilihan, pihak penyelenggara sekolah nunut pun memprotes regulasi yang diputuskan Dispendik. Mereka beralasan bahwa keputusan ini akan menghadirkan masalah pada banyak guru, karyawan, dan peserta didik. Pada guru dan karyawan, mereka jelas akan kehilangan pekerjaan yang telah ditekuni sekian lama. Sementara bagi peserta didik, karena sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang murah.

Tetapi, sekali lagi, ini jelas alasan yang perlu dibuktikan kebenarannya. Sebab, persoalan pengangguran dan pendidikan rakyat miskin jelas menjadi tanggung jawab negara. Dalam mengatasi problem ini, pemerintah telah meluncurkan banyak program, seperti dana BOS, BOS buku, Bantuan Operasional Pendidikan, dan tambahan insentif untuk guru.

Jika penyelenggara sekolah nunut mau berpikir jernih, sesungguhnya pemerintah juga sudah bersikap sangat toleran. Kasus sekolah nunut dibiarkan tetap operasional selama puluhan tahun, meski tidak memiliki gedung sendiri. Seharusnya selama puluhan tahun itu, pihak penyelenggara sudah mampu mentas dari sekolah induk dan memiliki gedung sendiri. Tetapi fakta menunjukkan bahwa sebagian besar penyelenggara sekolah nunut merasa tidak mampu.

Mereka beralasan bahwa dana yang dapat dimanfaatkan sangat minim dan hanya cukup untuk membiayai operasional sekolah. Alasan dana memang terdengar klasik, meski selalu relevan. Tetapi alasan minimnya dana sangat paradoks dengan daya tahan sekolah nunut. Sebab, kalau mereka tidak memiliki dana operasional yang cukup tentu sudah membubarkan diri sejak lama.

Karena itu, menurut saya yang penting dipahami dari kasus sekolah nunut ini adalah komitmen dan tanggung jawab para penyelenggaranya. Jika mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab, mestinya kasus ini tidak berlarut-larut. Mereka pasti menyadari bahwa pendidikan memang investasi jangka panjang sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tetapi dengan bermodal komitmen dan tanggung jawab yang kuat, rasanya persoalan tahunan yang dihadapi penyelenggara sekolah nunut pasti sudah dapat diselesaikan. Apalagi, jika belajar dari pengalaman, ternyata banyak di antara sekolah nunut ini mampu bangkit dan menjadi sekolah favorit, mampu berkembang pesat dan punya fasilitas sendiri.

Apapun alasannya, sekolah nunut memang tidak dapat dibenarkan. Selain tidak menunjukkan keseriusan dalam hal penyelenggaraan, ia juga akan memperburuk kultur dan sistem pendidikan. Jika sekolah nunut tetap dibiarkan, maka cita-cita mulia dari para penyelenggaranya, seperti memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat miskin dan membantu tugas negara, pasti tidak akan pernah tercapai. Ini karena masyarakat miskin pasti tidak akan pernah tercerahkan jika tidak ada keseriusan dan tanggung jawab dari penyelenggara pendidikan.

Bahkan yang terjadi mungkin sebaliknya, mereka akan semakin terpinggirkan karena tidak memiliki daya saing. Dan, lagi-lagi harus dikatakan bahwa ongkos sosial akibat dari pendidikan yang dikatakan murah dengan fasilitas seadanya ini akan jauh lebih mahal. *Output* lembaga pendidikan ini pasti akan melahirkan banyak persoalan sosial, seperti pengangguran yang kian menjadi. Kalau keadaannya sudah demikian, siapa yang mau bertanggung jawab?